

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A.V Dicey, 1915, *An Introduction to the Study of Law of the Constitution*, Macmillan, London.
- Denny Indrayana, 2008, *Negara Antara Ada dan Tiada*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Depdiknas, Jakarta.
- E. Utrecht, 1964, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta.
- E.C.S. Wade dan Godfrey Phillips, 1977, *Constitutional and Administrative Law*, Longman, London.
- Enrico Simanjuntak, 2018, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Transformasi & Refleksi)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Firmansyah Arifin, et all. , 2005, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara*, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Gunawan A. Tauda, 2012, *Komisi Negara Independen; Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru dalam Sistem Ketatanegaraan*, Genta Press, Yogyakarta.
- Hans Kelsen Translated by Anders Wedberg, 1961, *General Theory of Law And State*, Russel & Russel, New York.
- H.D., van Wijk, Willem Konijnenbelt, 1995, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Vuga, s'Gravenhage.
- Henry Campbell Black, 1990, *Black's Law Dictionary*, West Publishing, St. Paul Minn.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.

_____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

_____, 2014, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta.

Mahmuzar, 2014, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Nusa Media, Bandung.

Maria Farida Indrati S., 2007, *Ilmu Perundang-Undangan 1*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta.

Maria SW.Sumardjono, 2001, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Mian Khurshid A. Nasim, 1998, *Interpretation of Statutes*, Mansoor Book House, Lahore.

Miriam Budiardjo, 1998, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.

Muchsan, 2007, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah Dan Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Munir Fuady, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.

Ni'matul Huda, 2007, *Lembaga Negara Masa Transisi Menuju Demokrasi*, UII Press, Yogyakarta.

_____, 2010, *Ilmu Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

Nomensen Sinamo, 2010, *Perbandingan Hukum Tata Negara*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

- _____, *et.al.*, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law)*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- R. Kranenburg, 1973, *Perkembangan Peradilan Tentang Pertanggungjawaban Negara (Terjemahan Kasman Singodimejo dan R. Mohammad Saleh)*, Permata.
- Richard Pierce, Sidney A. Shapiro, dan Paul Verkuil, 2009, *Administrative Law and Process 5th Edition*, Foundation Press, California.
- Ridwan H.R., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- SF. Marbun, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta
- SF. Marbun dan Moh. Mahfud MD, 2011, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soehino, 2000, *Asas-asas Hukum Tata Usaha Negara*, Liberty, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, ELSAM, Jakarta.
- Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2011, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Kencana, Jakarta.
- Warren G. Bennis, 1966, *"The Coming Death of Bureaucracy"*, Think.
- William F. Funk dan Richard H. Seamon, 2001, *Administrative Law: Examples & Explanations Aspen Publishers*, New York.
- Yuslim, 2015, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yves Meny and Andrew Knapp, 1998, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany 3rd edition*, Oxford University Press.
- Zainal Arifin Mochtar, 2016, *Lembaga Negara Independen; Dinamika Perkembangan Dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.

B. Artikel, Jurnal, dan Makalah

Bruce Ackerman, "The New Separation of Powers", *The Harvard Law Review*, Vol.113, HVLR 633, Januari 2000.

Cornelis Lay, *State Auxiliary Agencies*, Jurnal Jentera Edisi 12 Tahun III, Jakarta: PSHK, April-Juni 2006.

Herman dan Hendry Julian Noor, "Doktrin Tindakan Hukum Administrasi Negara Membuat Keputusan (*Beschikking*)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, volume 3, nomor 1, Februari 2017.

Khuriyatul Husna, 2010, Independensi komisi pemilihan umum (KPU) pada pemilu 2004 dan 2009, *Tesis*, Magister Administrasi Publik UGM, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Lizamul Umam, 2017, Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang, *Tesis*, Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang.

Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Administrasi Pemerintahan, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi.

Sri Hidayati, 2006, Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menanggulangi Mal Administrasi, *Tesis*, Magister Hukum Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Sri Sumantri, "Kekuasaan dan Sistem Pertanggungjawaban Presiden Pascaperubahan UUD 1945", *Makalah*, Disampaikan pada Seminar Sistem Pemerintahan Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945 yang diselenggarakan oleh Depkimham bekerja sama dengan Fakultas Hukum Unair dan kanwil Depkimharn Provinsi Jawa Timur

Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance (International IDEA)* 2002.

Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan, "Efektivitas Sistem Penyeleksian Pejabat Komisi Negara di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, vol. 6, nomor 3, September 2009.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XIV/MPR/1998 Tahun 1998 Tentang Perubahan Dan Tambahan Atas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1988 Tentang Pemilihan Umum

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 3344.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3887.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4250.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 4252.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4380.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4415.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5079.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5246.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2017 Nomor 6109.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5588.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Dicantumkan mengenai prinsip kemandirian Komnas HAM.

Surat Edaran Nomor 8 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis tentang Sengketa mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah

Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan Umum Kepala Daerah

Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Pengadilan Tata Usaha Negara

D. Internet

<https://infopemilu.kpu.go.id/>, diakses pada 10 Januari 2019, Pukul 1:34 WIB.

Jonathan Turley, "The Rise of the Fourth Branch of Government", https://www.washingtonpost.com/opinions/the-rise-of-the-fourth-branch-of-government/2013/05/24/c7faad0-c2ed-11e2-9fe2-6ee52d0eb7c1_story.html?utm_term=.b36eea3ef34e, diakses pada 7 Januari 2017, Pukul 20.21.

Kunto Wibisono, "*KPU tunda pilkada wali kota Manado*", <https://www.antaranews.com/berita/534069/kpu-tunda-pilkada-wali-kota-manado>, diakses pada 23 September 2018, Pukul 18.51 WIB.

Tigor Munthe, "*Pilkada Ditunda, Wali Kota Pematangsiantar Kumpulkan Camat Tengah Malam*", <https://regional.kompas.com/read/2015/12/09/05080141/Pilkada.Ditunda.Wali.Kota.-Pematangsiantar.Kumpulkan.Camat.Tengah.Malam>, diakses pada 23 September 2018, Pukul 18.15 WIB.